

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 2 (2023) 497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062

Peran Pemerintah Kelurahan Sei Kera Hilir II dalam Kepemerintahan yang Baik

Idris Siregar¹, Nur Meisah², Nita Permatasari³, Muhammad Rayyan Kadafi⁴,
Mas Yogi⁵, Dirga Arif Wardana⁶, Syahroni Siregar⁷, Muhammad Fahri Harahap⁸

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

idrissiregar@uinsu.ac.id¹

ABSTRACT

Government has a very important role in the development of a country or region. To create a safe country, good governance is needed. Good governance is a follow-up or evolution in administering government from good government changes to governance. The purpose of this research is to find out how the role of the Sei Kera Hilir II village government is in good governance. The method used in this research is to use qualitative methods and data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the village government of Sei Kera Hilir has been running well which is marked by implementing a system of transparency in its governance. In addition, the government has fully involved the community, in this case showing that the kelurahan government plays a role in increasing the principle of community participation. In creating equality and good governance, the lurah has authority and delegates it to village community leaders so that it can run evenly and there is mutual control between the community and village government apparatus.

Keywords : role, government, kelurahan.

ABSTRAK

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sebuah negara atau daerah. Untuk mewujudkan negara yang aman perlu adanya pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik merupakan suatu tindak lanjut atau evolusi dalam menyelenggarakan pemerintah dari perubahan pemerintah yang baik pada suatu pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kelurahan Sei Kera Hilir II dalam pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan Sei Kera Hilir sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan menerapkan sistem transparansi dalam pemerintahannya. Selain itu pemerintah sudah sepenuhnya melibatkan masyarakat, dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan berperan meningkatkan prinsip partisipasi masyarakat. Dalam menciptakan kesejajaran dan pemerintahan yang baik, lurah mempunyai wewenang dan mendelegasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat kelurahan untuk dapat berjalan secara merata dan adanya saling kontrol antara masyarakat dan aparaturnya Pemerintah Kelurahan.

Kata kunci: peran, pemerintah, kelurahan.

PENDAHULUAN

Perintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan dan mengatur sebuah negara. Untuk mewujudkan tatanan negara yang bagus, pemerintah harus membuat peraturan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 2 (2023) 497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062

menerapkannya dengan baik. Yang dimaksud pemerintahan yang baik adalah suatu tindak lanjut atau evolusi dalam menyelenggarakan pemerintah dari perubahan pemerintah yang baik pada suatu pemerintahan. Karena good governance dapat menyeimbangkan keselarasan pemerintah dengan pihak lain di berbagai sektor untuk menciptakan tatanan dalam menjalankan good governance dan clean, maka dikategorikan sebagai proses good governance yang diterapkan di semua negara. Hal ini karena good governance cenderung lebih efektif dan efisien dalam proses dan tujuannya.

Perlu waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya, pedoman pelayanan yang jelas dan terukur, anggaran, sasaran, dan target kinerja, diperlukan otonomi dan kebebasan. Penerapan prinsip-prinsip good governance harus berjalan seiring dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan publik, pembangunan, dan pemerintahan. Proses pelaksanaan kontrol atas penyediaan barang dan jasa publik dikenal sebagai tata kelola yang baik. Efektivitas, keadilan, pemerataan, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi adalah prinsip tata kelola yang baik.

Seni mengelola pemerintahan untuk menawarkan layanan kepada rakyat dikenal sebagai pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik dalam konteksnya adalah kesepakatan tentang pengaturan negara yang dibuat bersama oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu dibangun dialog antar aktor-aktor penting dalam negara, sehingga semua pihak merasa memiliki otoritas dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dengan era globalisasi, tuntutan akan good governance menjadi suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Kemakmuran tidak akan tercapai tanpa adanya kesepakatan yang dihasilkan dari dialog karena aspirasi politik dan ekonomi rakyat pasti akan digagalkan. Pemerintah harus memperhatikan sejumlah isu agar warga dapat menilai, memilih, bahkan meminta pelayanan yang lebih baik.

Sebagai perangkat daerah yang berada di bawah kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat, wilayah kerja lurah dikenal dengan nama kelurahan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kelurahan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang diberikan oleh Camat serta tugas pemerintahan lainnya. Kecamatan dan kelurahan memiliki hubungan kerja yang hirarkis. Tujuan dibentuknya kelurahan adalah untuk meningkatkan kapasitas administrasi kelurahan agar berhasil melayani masyarakat sesuai dengan tingkat dan kemajuan pembangunan.

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dapat dijadikan sebagai komponen prakarsa untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dan demokratisasi, yang mencerminkan penghargaan tinggi penguasa terhadap penegakan hak warga negara, penegakan prinsip keadilan dan kesetiakawanan

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 2 (2023) 497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062

sosial, serta penegakan hak asasi manusia di berbagai bidang. kehidupan publik. misalnya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip rule of law atau penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Suatu konsep ideologi politik yang memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang mendasar atau menyeluruh yang harus diikuti sebagai pedoman dalam mengatur urusan Negara juga dapat dipandang sebagai pemerintahan yang baik.

Sejumlah tantangan harus diatasi oleh masyarakat Desa Sei Kera Hilir II yang baik, seperti banyaknya praktik administrasi birokrasi yang disamarkan dengan berbagai tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pejabat tinggi pemerintah. Selain itu, dalam menjalankan tanggung jawab dan bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, penyelenggara negara (termasuk legislator dan penyelenggara pemerintahan) seringkali bertindak dengan cara yang bertentangan dengan prinsip etika. Kesombongan dan ketidakpedulian aparat pemerintah berbenturan dengan suara rakyat yang menginginkan figur pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Menurut pengamatan penulis, kondisi ini juga terjadi di Kecamatan Sawang Bendar, salah satu Kelurahan di Kecamatan Tahuna. Di sana terlihat kerja aparat kelurahan masih lamban, biaya pelayanan tidak jelas, masih ada diskriminasi terhadap masyarakat, dan aparat kurang memadai. Juga terlihat bahwa proses dan apa yang dilakukan kurang transparan.

Pemerintah Kelurahan harus terlebih dahulu mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk peluang serta tantangan dan hambatan yang ada di era otonomi ini. Dalam rangka memenuhi perannya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pemerintah juga harus menanggapi dan melaksanakan keinginan-keinginan dari konstituennya, yaitu masyarakat. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Sawang Bendar, diperlukan pelayanan yang optimal di kecamatan. Sesuai dengan latar belakang penelitian, permasalahan dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut: Bagaimana peran Pemerintah Desa Sawang Bendar dalam penerapan good government? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penggunaan beberapa indikator, antara lain peran Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang meliputi: a. Fungsi lurah dalam pemerintahan yang transparan (transparency). b. Fungsi lurah dalam membina keterlibatan masyarakat dan mewujudkan good governance. c. Peran lurah dalam mewujudkan cita-cita keadilan hukum dan mewujudkan pemerintahan yang baik (Rule of Law). d. Tanggung jawab lurah adalah menyelenggarakan pemerintahan yang baik di Kelurahan berdasarkan kewajiban dan tugas.

TINJAUAN TEORI

Peran

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 2 (2023) 497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama (Sarlito, 2015: 215).

Sedangkan menurut Merton (Raho, 2007: 67) peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelurahan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan; d. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah; e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan; f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan; g. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan; h. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat; i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, peran pemerintah kelurahan Sawang Bendar dapat dioperasionalkan dengan indikator sebagai berikut : a. Pembina masyarakat, b. Pengayom masyarakat, c. Pelayan masyarakat.

Keperintahan Yang Baik

Kepemerintahan Yang Baik merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 2 (2023) 497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062

dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka (Achmadi : 2002:9). Disisi lain istilah pemerintahan yang baik menurut Dwi Payana (2003:45) merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama. Berbagai definisi Pemerintahan Yang Baik (Dwi Payana, 2003:47) lainnya adalah sebagai berikut: "Kepemerintahan Yang Baik" di artikan sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yang mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik".

Konsep pemerintahan yang baik pada suatu gagasan adanya saling (interdependence) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan disemua level di dalam Negara (Legislatif, Eksekutif, yudikatif, militer) dan sektor swasta (Perusahaan, lembaga keuangan). Dengan kata lain, didalam pemerintahan yang baik hubungan antar Negara, masyarakat madani, dan sektor swasta harus dilandasi prinsip-prinsip transparansi,akuntabilitas publik dan partisipasi, yaitu suatu prasyarat kondisional yang dibutuhkan dalam proses pengambilan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dan akseptibilitas masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dibuat bukan ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki, tetapi sangat tergantung dari sejauh keterlibatan aktoraktor didalamnya.

Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik

Menurut kamus besar bahas Indonesia dalam KoAk (2002:55) dikatakan bahwa prinsip mengandung pengertian "asas" (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak, dan sebagainya). Secara harafiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang mnejadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya. Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini, maka faktor yang ditekankan disini adalah bagaimana suatu "Prinsip" dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kebenaran umum bukan sekedar mengetahui atau memahami saja hakikat dari pada prinsip itu sendiri. Selain itu juga berbicara mengenai bagaimana suatu prinsip diterapkan secara seimbang dan selaras sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan ketimpangan (overlapping) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian Good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 2 (2023) 497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2001:31) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Fokus dalam penelitian ini adalah peranlurah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yang di kaji melalui :

1. Peran lurah dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka (*transparency*).
2. Peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan partisipasi (*participation*) masyarakat.
3. Peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengedepankan prinsip keadilan hukum (*Rule of Law*).

Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi , wawancara mendalam (*in depth interview*) dan studi dokumen (Sugiyono, 2007:147).

PEMBAHASAN

Peran Lurah Dalam Menjalankan Pemerintahan Yang Terbuka (*Transparency*)

Bagaimana membangun atau menciptakan suatu mekanisme pemerintahan yang dapat menjalankan misinya mewujudkan masyarakat sejahtera berkeadilan

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 2 (2023) 497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062

merupakan salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa. memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan tetap melaksanakan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Saat ini sistem pemerintahan Sei Kera Hilir II sudah berjalan dengan baik, dan dana desa sudah transparan. Hasilnya, Desa Sei Kera Hilir II telah mencapai tata pemerintahan yang baik. Transparansi, yang ditandai dengan keterbukaan, tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam semua informasi yang tersedia untuk umum, merupakan salah satu ciri tata pemerintahan yang baik.

Peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan partisipasi (participation) masyarakat

Struktur yang tepat diperlukan untuk mendukung tata kelola yang baik. Akibatnya, baik pemerintah pusat maupun daerah secara berkala perlu menilai efektivitas struktur yang ada dan melakukan penyesuaian struktural untuk memenuhi kebutuhan yang berubah, seperti menyelaraskan kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan dan mengatur posisi dan fungsi yang lebih sesuai. Selain itu, pemerintahan saat ini harus terus bekerja untuk memaksimalkan hasil dengan memanfaatkan uang dan sumber daya lainnya secara efektif. Dalam situasi ini, perlu dilakukan upaya untuk terus mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Pemborosan dana dan sumber daya saat ini akan terjadi jika prinsip efisiensi dan efektivitas tidak diterapkan.

Lurah mengajak masyarakat untuk dapat berkontribusi membangun masyarakat dengan memberi baik secara fisik maupun materil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan. Peraturan kelurahan Sei Hilir II mencantumkan dana dari pemerintah daerah sebagai standar utama lurah. Selain itu, lurah menyerukan kerjasama antara sektor swasta dan masyarakat, mendorong donasi untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Kelurahan dan bekerja sama dengan pemilik tanah untuk mencari pekerjaan bagi mereka yang menganggur. Pemerintah dan masyarakat di Kelurahan telah membangun hubungan yang baik hubungan kerja berkat kerjasama mereka dengan penduduk setempat. Hubungan ini sangat kuat sekarang karena komunitas telah merespons. Kerjasama ini terjalin antara lain dalam hal kegiatan ekonomi produktif, seperti kegiatan keagamaan, mengumpulkan hasil perkebunan karet, dan kegiatan kerjasama timbal balik untuk membersihkan lingkungan Kelurahan, seperti sarana dan prasarana. Kerjasama tersebut antara lain berupa pembiayaan kegiatan pembangunan atau yang dikenal dengan swadaya masyarakat, seperti rumah ibadah.

Peran lurah dalam membina kerjasama antara pihak swasta, pemilik tanah, dan warga masyarakat dengan memanfaatkan hasil bumi yang ada di Kelurahan sangat berarti bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Lurah melakukan beberapa pendekatan kepada masyarakat dan aparatur

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 2 (2023) 497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062

pemerintahannya, demi pembangunan dan demokrasi di Kelurahan, berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan pembangunan di Kelurahan dengan cara mengembangkan perekonomian masyarakat melalui PNPM. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sawang Bendar guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan terbuka.

Peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengedepankan prinsip keadilan hukum (Rule of Law)

Penyelenggaraan pemerintahan kota. Seorang pemimpin atau kepala desa tidak sendirian menjalankan pemerintahan di Kelurahan karena seorang pemimpin diharapkan dapat mendelegasikan atau mendelegasikan tugas kepada bawahannya. Akibatnya, tidak ada kekuatan yang dapat menghambat demokrasi di kelurahan atau melaksanakan pemerintahan yang baik karena kewenangan lurah terkekang.

Kewenangan lurah berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan, menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja kelurahan untuk pembahasan, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. dengan cara mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan, serta dapat menunjuk seorang wakil yang sah untuk mewakili sesuai dengan kepentingan desa. Berikut ini merupakan salah satu bentuk peran kelurahan Sei Kera Hilir II dalam menjalankan pemerintah yang baik:



Lurah sangat mengetahui apa kewenangannya sebagai lurah untuk menjalankan fungsinya dengan memimpin Pemerintahan Kelurahan secara demokratis yaitu hanya sebagai tempat setelah peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak mengenai sejauh mana kewenangan lurah dan apakah kewenangan sebagai lurah menjalankan fungsinya sebagai pimpinan pemerintahan Desa Sei Kera Hilir II sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 2 (2023) 497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062

1. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintah desa Sei Kera Hlir II sudah termasuk transparans.
2. Selain itu pemerintah sudah sepenuhnya melibatkan masyarakat, dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan berperan meningkatkan prinsip partisipasi masyarakat.
3. Dalam menciptakan kesejajaran dan pemerintahan yang baik, lurah mempunyai wewenang dan mendelegasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat kelurahan untuk dapat berjalan secara merata dan adanya saling kontrol antara masyarakat dan aparatur Pemerintah Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, "Membangun Good Governance Di Desa" (IRE Press, Yogyakarta,2003)

Achmadi, dkk. 2002. Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia. Jakarta.

Bernard Raho, SVD. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka
Publiser.

Komite Anti Korupsi (KoKAK), 2002, "Panduan Rakyat Memberantas Korupsi",
Cetakan Pertama, Penerbit Komite Anti Korupsi (KoAk), Bandar Lampung.

Moleong Lexy J., 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya:
Bandung

Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A. 2015. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba
Humanika.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.